

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2003.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002.
- Bhenyamin Hoessein dalam Soetandyo Wignosubroto, *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Institut for Local Development, Yayasan Tifa, 2005.
- C.F. Strong, *Modern Political Constitution*, revised edition, Sidgwick and Jackson, London, 1952.
- Dahlan Thaib, *Impelmentasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Diana Yusyanti, *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi Dalam Otonomi Daerah*, Jurnal Rechvinding, Volume 4, Nomor 1, April 2015.
- Diane Revitch dan Abigail Thernstrom, *Demokrasi Klasik dan Modern*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Djohermansyah Djohan, *Merajut Otonomi Daerah pada Era Reformasi*, IKAPTK, Jakarta, 2014.
- Eddy Asnawi, dalam *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2003.
- Eko Prasajo, Irfan Ridwan Maksum dan Teguh Kurniawan, *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*, DIA FISIP UI, Jakarta, 2006.
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Putra Bardin, Bandung, 1999.

- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (General Theory of Law and State) diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2006.
- Harsono Suwardi dkk, *Politik, Demokrasi dan Manajemen Komunikasi*, Galang Press Yogyakarta, 2002.
- Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Hendra Nurtjahyo, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- J. Kaloh, *Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah, dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Jimly Ashiediqy, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- _____, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, Jakarta, 2002.
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, sistem Dan Problema Penerapan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Kholid O Santoso, (Ed), *Mencari demokrasi Gagasan dan Pemikiran*, Segi Arsy, Bandung, 2009.
- M. Mahrus Ali, *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur Dan Masif*, Pusat Penelitian Dan Pengkajian Kepaniteraan Dan Sekretariat Jendral MKRI, Jakarta, 2011.
- Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi revisi. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

- Maria S.W. Sumardjono, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mariun dalam Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- _____, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 1989.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daeah Secara Langsung*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ruslan Abdulgani, Beberapa Catatan tentang Pengamalan Pancasila dengan Penekanan kepada Tinjauan Sila ke-4 yaitu Demokrasi Pancasila, dalam *Demokrasi Indonesia Tinjauan Politik, Sejarah, Ekonomi-Koperasi dan Kebudayaan*, Yayasan Widya Patria, Yogyakarta, 1995.
- Said Ruhpina, *Menuju Demokrasi Pemerintahan*, Universitas Mataram Press, Mataram, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, cetakan kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- _____, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1984.

Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.

St. Harum Pudjiarto, *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1994.

Suharizal, *Pilkada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, RajaGrafindo, Jakarta, 2011.

Syaukani, HR., Afan Gaffar, dan M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, cetakan kesebelas, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Waldemar Besson dan Gotthard Jasper, *The Rule of Law and Justice Bind All State Authority*, dalam Josef Thesing (ed), *The Rule of Law*, Konrad Adenae Stiftung, Sank Augustin, 1997.

Zudan Arif Fakrulloh, *Ilmu Lembaga Dan Pranata Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Undang-Undang:

Undang Undang Dasar 1945.

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Laporan Penelitian/Skripsi/Tesis

Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992, sebagaimana dikutip Andini Maharani Putri, “Penyusunan Naskah Akademik Dalam Mendukung Pembentukan Produk Hukum Daerah Yang Baik”, *Tesis*, Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014.

Jurnal:

Agus Pramusinto, *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah*, dalam Jurnal CSIS, Vol. 33, No.2 Juni 2004.

Al. Andang L. Binawan “Merunut Logika Legislasi”, *Jentera Jurnal Hukum*, Edisi 10 – Tahun III, Oktober 2005.

Jurnal Hukum Respublica, Vol. 3, No. 1 Tahun 2003, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2003.

Website:

Arkanudin, “Pilkada Langsung Dan Pengembangan Demokrasi: Pelajaran Dari Sintang Dari Pilkada 2005”, diunduh dari <http://prof-arkan.blogspot.co.id/2012/04/pilkada-langsung-dan-pengembangan.html>, 14 Maret 2016.

Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, “Proses Pembentukan Undang-Undang”, diunduh dari: <http://www.fsps.or.id/2016/01/proses-pembentukan-undang-undang.html>, 22 Agustus 2016.

Kacung Marijan, "*Wajah Demokrasi Kita*", <http://www.republika>, 23 Januari 1999.

Michael Bayles, Law and Politics, at <http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1014/14.pdf>, 6 April 2013.

Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2015”, diunduh dari <http://www.peraturan.go.id/proleg/detail/11e4e4d1594c1f80ab3e313431343132.html>, 21 Agustus 2016.

RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU”, diunduh dari <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>, 21 Agustus 2016.